RESPON MASYARAKAT TERHADAP BANTUAN PEMERINTAH SELAMA COVID-19 DI KOTA BANDUNG

Yuliana Maknolia[1)], Dasrun Hidayat[2)]
Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya Bandung
Email : yulianamaknolia1105@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini dilatar belakangi oleh situasi pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan virus jenis baru yang saat ini belum ditemukan obat dan vaksin yang bisa digunakan untuk mengatasi penularan dan penyebarannya. Hal ini membuat pemerintah dan pihak-pihak bersangkutan harus bekerja keras untuk menangani situasi ini. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, mulai dari peningkatan protokol kesehatan, pelaksanaan physical distancing hingga penyaluran bantuan secara ekonomi dan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19. Salah satu bantuan yang dikeluarkan pemerintah adalah BLT atau Bantuan Langsung Tunai. Bantuan ini menimbulkan berbagai respon dari masyarakat, mulai dari kritik mengenai penyalurannya yang tidak tepat, manfaat dari bantuan ini, hingga saran yang disampaikan masyarakat mengenai keefektifan bantuan yang diberikan. Respon merupakan reaksi penolakan atau persetujuan dari diri seseorang setelah menerima pesan. Timbulnya respon disebabkan oleh adanya subjek yang menarik perhatian komunikan. Adapun respon yang dimaksud seperti Menurut Saifuddin Azwar (2015:14) dalam bukunya yang berjudul Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya respon adalah suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau merupakan hasil stimulus tersebut. Respon hanya timbul apabila individu dihadapkan pada stimulus yang menghendaki adanya reaksi individu. BLT dari pemerintah menyebabkan munculnya respon dari masyarakat yang justru banyak menuai kritik. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya informasi, sosialisasi dan kegagalan distribusi yang mengakibatkan BLT yang disalurkan tidak tepat sasaran.

Kata Kunci: *COVID-19;Bantuan Langsung Tunai;Respon masyarakat.*

PENDAHULUAN

Respon adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu bukan hanya menimbulkan kesan positif, namun juga dapat memberikan tanggapan yang membangun, baik berupa kritik atau saran yang disampaikan kepada komunikator melalui adanya komunikasi. Respon juga dapat diartikan sebagai tanggapan yang meninggalkan kesan kepada suatu subjek atau peristiwa yang diperoleh darui informasi-informasi dan pesan yang disimpulkan. Respon dalam komunikasi adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan yang kemudian akan menghasilkan suatu efek. Dalam suatu tanggapan atau respon tentu ada faktor penyebabnya, dan faktor penyebab inilah yang harus dipahami agar tanggapan atau respon yang dihasilkan oleh individu bersangkutan dapat ditanggapi dengan baik. Proses awal komunikasi, individu tidak hanya menerima tanggapan dari stimulus yang dihasilkan dilingkungan sekitarnya saja. Karena tidak semua stimulus yang diterima dapat menarik bagi individu itu sendiri. Keadaan pada diri individu juga mempengaruhi tanggapan yang akan disampaikan oleh masing-masing individu (Setiawan, 2017).

Dengan menggunakan teori komunikasi Behaviorisme sebagai bahan acuan peneliti. Teori ini merupakan teori yang dikembangkan oleh ilmuan asal Amerika Serikat bernama Jhon B. Watson (1878 – 1958). Menurutnya Teori Behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut.

Respon yang dimaksud disini adalah respon masyarakat terhadap bantuan langsung tunai dari pemerintah selama pandemi COVID-19 di kota Bandung. Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang diberikan oleh pemerintah difokuskan kepada masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 dengan indeks Rp.600.000 per keluarga. Bantuan ini akan diberikan selama 3 bulan dan akan dimulai pada april 2020 dan diberikan kepada keluarga yang tertulis dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Namun dengan syarat bahwa penerima bantuan ini tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Pangan Non Tunai.

Bantuan Langsung Tunai sebenarnya telah dikeluarkan pemerintah semenjak 2008 sebagai salah satu cara pemerintah untuk megurangi angka kemiskinan di Indonesia. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian bantuan berupa sejumlah uang kepada masyarakat kategori miskin yang saat ini tengah merasakan dampak akibat adanya pandemi COVID-19.

Penyelenggaraan BLT sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS). Program BLT ini dalam pelaksanaanya diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang terkategori sebagai RTS), dengan tujuan mendorong perekonomian masyarakat miskin, membangun tanggung jawab sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang secara konsisten dapat memperhatikan masyarakat msikin termasuk RTS (Akib & Risfaisal, 2016). Program ini pada sebagian kasus justru disalah gunakan, banyak masyarakat kategori mampu yang ikut medaftarkan diri dalam program BLT yang akibatnya banyak BLT yang disalurkan tidak tepat sasaran. Hal inilah yang membuat program BLT dirasa kurang efektif dalam penyalurannya. Namun, ada dua efek positif yang dihasilkan dari program ini, pertama untuk membantu masyarkat memenuhi kebutuhannya terutama bagi masyarakat yang kehilangan penghasilan semenjak adanya COVID-19. Kedua, menghidupkan daya beli masyarakat yang wilayahnya mendapatkan suntikan dana dari program ini.

Pemerintah dapat bermakna "perintah" yang artinya harus dilaksanakan dan dipatuhi. Pemerintah dalam bahasa inggris yaitu "government". Kata government dapat bermakna; melaksanakan wewenang pemerintahan, cara atau sistem memerintah, fungsi atau kekuasaan untuk memerintah, wilayah atau Negara yang diperintah, badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara (Samud, 2018). Dalam hal ini, pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah (Dr. H. Rahyunir Rauf, 2017).

Pemerintahan pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kinerja dan pengabdian kepada negara untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintahan dibentuk bukan hanya untuk melayani dirinya sendiri dan kalangan pejabat namun pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dengan tujuan memberikan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya Negara. Pemerintah juga dituntut menyediakan lahan bagi masyarakat untuk mrengembangkan kreativitas dan kemampuannya untuk tujuan bersama (Desvanda Arya Putra, Reyndi Rusmanjaya, M. Hifdzi Rusydany, 2020). Adanya pandemi COVID-19 ini membuat perekonomian Indonesia melemah, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat adanya pandemi COVID-19. COVID-19 adalah virus jenis baru yang yang penyebarannya hampir sama seperti SARS, namun virus ini belum diketahui cara penanganan dan pengobatannya. COVID-19 sangat cepat menular dan menyebar terutama pada lansia dan orang-orang yang memiliki imun tubuh yang lemah (Susilo et al., 2020). Hampir semua negara di dunia sudah terpapar virus ini dan Indonesia saat ini juga sudah terpapar virus corona, hal inilah yang membuat banyak masyarakat panik dan resah.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memutus penyebaran dari virus ini. Dengan adanya virus ini mulailah muncul berbagai permasalah di Indonesia yang berdampak pada ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat. Perekonomian masyarkat mulai menurun drastis terutama semenjak diberlakukannya lockdown dan PSBB dibeberapa wilayah khususnya di kota-kota besar yang terdampak COVID-19 (Yunus et al., 2020). Untuk mengantisipasi angka kemiskinan baru, semenjak adanya pandemi COVID-19 maka pemerintah mulai mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT). Dengan dikeluarkannya bantuan ini menimbulkan banyak respon dari masyarakat, respon dari masyarakat inilah yang akan dijadikan tujuan utama oleh peneliti dalam melakukan riset dilapangan. Dalam proses penelitian ini tentu akan ada masyarakat yang memberikan respon positif atas dikeluarkannya bantuan ini. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang memberikan respon negatif karena bantuan ini dirasa tidak tepat sasaran dan hanya sebagian kecil masyarakat saja yang mendapat bantuan ini padahal hampir semua masyarakat merasakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini.

TINJAUAN PUSTAKA

1. R Wijayanti (2017) Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu kegiatan (activity) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan (Jalaludin Rahmat,, 1999: 51).
2. Selviana, Irwan Akib, Risfaisal Vol.3 No.2 (2016) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin.

3. Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si Vol.3 No.1 (2017) Pemerintah menurut Sumaryadi (2010;18), bahwa; "secara umum pemerintah dapat didefenisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki; a) Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik. b) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will) c) Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan. d) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

4. Edy Parwanto Vol.3 No.1 (2020) Virus corona termasuk superdomain biota, kingdom virus. Virus corona adalah termasuk kelompok virus terbesar dalam jenisnya. Semua virus dalam ordo Nidovirales adalah nonsegmented positive-sense RNA viruses (Yuliana, 2020).

5. Menurut Susanto (2011:167) Teori Behaviorisme ialah perubahan perilaku yang terjadi melalui proses stimulus dan respon yang bersifat mekanis. Oleh karena itu, lingkungan yang sistematis, teratur, dan terencana dapat memberikan pengaruh (stimulus) yang baik sehingga manusia bereaksi terhadap stimulus ini dan memberikan respon yang sesuai. Teori ini digunakan untuk mengetahui respon dan stimulus yang terjadi kepada masyarakat setelah pemerintah mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai.

HIPOTESIS PENELITIAN

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, makahipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah memunculkan respon dari masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dalam penelitian kualititatif. Metode ini merupakan jenis metode yang menggunakan subjek dan objek tanpa adanya rekayasa. Penelitian dibuat sesuai dengan hasil yang didapat peneliti dilapangan dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, tanpa adanya penambahan atau pengurangan informasi yang bersifat rekayasa, Metode ini digunakan dalam penelitian respon masyarakat terhadap bantuan langsung tunai dari pemerintah selama pandemi COVID-19 di kota Bandung untuk mengetahui subjek dan objek yang ditentukan. Wawancara dilakukan kepada para responden dengan kriteria masyarakat yang terkena PHK, masyarakat yang sama sekali tidak memiliki penghasilan selama adanya pandemi dan masyarakat miskin baru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya dan langkah pemerintah dalam menghadapi dan menangani Pandemi virus ini yaitu dengan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan Social Distancing atau Physical Distancing dan juga melakukan program *Stay At Home* yang secara berkelanjutan menjadi Tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan di setiap daerah terutama daerah yang dikategorikan Zona Merah. Dengan adanya pembatasan tersebut menyebabkan masyarakat tidak bisa dengan bebas melakukan segala kegiatan diluar rumah salah satunya yaitu kegiatan bekerja, beberapa jenis pekerjaan yang dapat menerapkan sistem Work From Home (WFH) misalnya pekerja kantoran (swasta) maupun Instansi Pemerintahan, akan tetapi tidak semua pekerjaan dapat menerapkan sistem WFH, khususnya untuk pekerja harian dan pekerja sektor Informal (contoh : pedagang, pekerja/buruh harian) sehingga hal ini akan berdampak kepada menurunnya pendapatan pekerja harian maupun sektor Informal bahkan sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga tingkat pengangguran meningkat dan mengakibatkan golongan masyarakat tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memiliki beberapa upaya seperti melakukan beberapa program bantuan dan kebijakan bantuan kepada para masyarakat di lapisan bawah yang bertujuan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalan Bantuan Sosial secara langsung atau Bantuan Langung Tunai (BLT) yaitu mengalokasikan anggaran dengan besaran Rp.600.000 per bulan selama 3 bulan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK. Namun, bantuan yang diberikan tersebut dapat membuat masyarakat menjadi ketergantungan terhadap pemerintah selama Pandemi ini. Hal tersebut mengakibatkan munculnya masalah sosial yang baru. Berdasarkan sudut pandang pekerja sosial, masyarakat yang menerima bantuan oleh pemerintah menjadi tidak berfungsi secara sosial atau tidak dapat menjalankan keberfungsian sosialnya. Keberfungsian Sosial dalam hal ini yaitu kondisi ketika masyarakat mampu melaksanakan peran sosialnya dengan baik sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dan memenuhi kebutuhannya.

BLT merupakan bantuan langsung tunai yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat

miskin yang terdampak COVID-19. Melihat dari program pemerintah tersebut, upaya penanganan dampak akibat pandemi COVID-19 di negara Indonesia ini cukup menarik simpati masyarakat. Sehingga masyarakat awam beramai-ramai memuji pemerintah atas program BLT. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat pada taraf kategori mampu pun ikut menjadikan diri sebagai sasaran BLT. Tetapi program pemerintah ini dirasa kurang efektif. Karena Bantuan ini sedikitnya mempunyai dua efek positif, pertama untuk menambah daya beli rakyat miskin yang pendapatannya makin turun dibawah kebutuhan rata-rata normal. Kedua, menyuntikkan dana ke wilayah miskin untuk menghidupkan daya beli yang relatif sudah sangat rendah. Dalam hal pemberian BLT ke masyarakat miskin ini tentunya ada persyaratan atau kriteria khusus.Tetapi kenyataan fungsi BLT ada yang menyalahgunakan. Fungsinya hanya membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi orang menggunakannya untuk hal yang dirasa kurang penting. Seperti tukang becak biasanya uang BLT tersebut digunakan untuk membeli Rokok .dan ada juga yang digunakan untuk membeli baju atau sepatu. Intinya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang dirasa kurang penting untuk kebutuhan mereka. Selain fungsi yang disalahgunakan, Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Seringkali data untuk persyaratan tersebut dipalsukan, Maka bukan orang miskin lagi yang menerima Bisa saja orang lain. Bantuan ini mulai dikeluarkan pada april 2020 terhitung selama tiga bulan, dengan nominal sebesar Rp.600.000 per KK. Bantuan ini menuai banyak respon dari masyarakat semenjak dikeluarkannya, banyak yang memberikan respon positif namun tidak sedikit yang memberikan respon negatif. Penyebabnya karena bantuan ini dirasa tidak tepat sasaran dan tidak merata. Masyarkat banyak mengkritik bahwa yang terdampak bukan hanya sebagian masyarakat saja, namun seluruh masyarakat yang berada di kota-kota yang telah terjangkit juga terkena dampaknya. Masyarakat hanya berharap pemerintah dapat lebih selektif lagi dalam penyaluran bantuan. Setiap masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus terbagi sama rata. Dan tidak adanya proses pungli selama pemberian bantuan ini. kelemahan-kelemahan dan masalah–masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, antara lain :

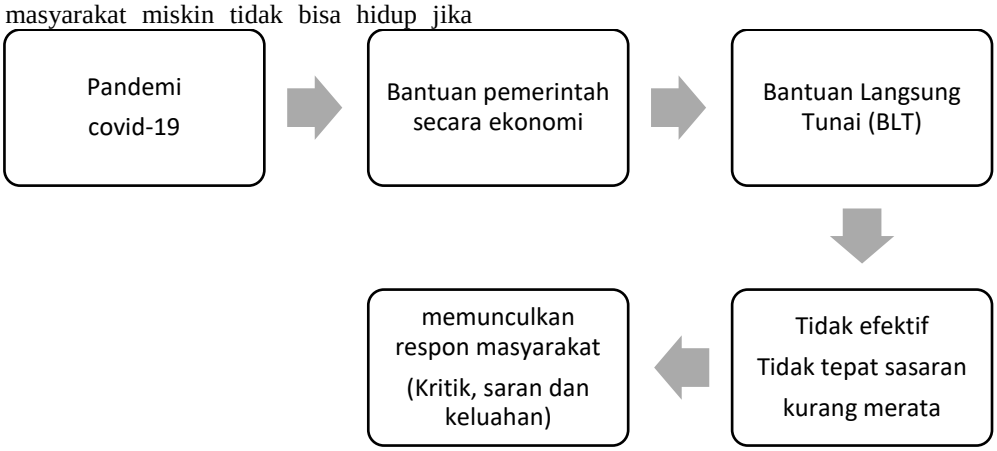
1. Kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.
2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tersebut.
3. Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat.
4. Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak
5. Peran aktif masyarakat yang kurang / minim, sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan

Agar program BLT dapat menjadi bantuan yang efektif dan efisien, maka diperlukan beberapa langkah, yaitu:

1. Manajemen penyaluran dana yang baik dan sistematis, agar tercapai tujuan dari program BLT yang sebenarnya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat kecil.
2. Diperlukan pengawasan terhadap penyaluran dana BLT, karena banyak ditemukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan program BLT tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.
3. Bantuan dana langsung tidak diberikan dalam bentuk uang tunai yang diberikan Cuma-cuma kepada masyarakat karena dikhawatirkan masyarakat hanya akan bergantung pada BLT, maka bantuan dana langsung direalisasikan dalam bentuk bantuan dana untuk usaha sehingga dari dana tersebut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat agar tidak menjadi masyarakat yang pemalas karena hanya menggantungkan dari bantuan selain itu dapat mengurangi tingkat pengangguran (Akib & Risfaisal, 2016).

Menurut hasil penelitian di lapangan ada 22 kepala keluarga tidak mampu yang tidak menerima BLT, sebagian dari keluarga ini menolak untuk diwanwancarai. Hasil ini saya ketahui melalui wawancara dengan masyarakat kelurahan karena yang bersedia untuk di wawancarai dan dianggap mengetahui tentang pendataan penerima BLT tersebut. Selain itu Dampak BLT terhadap kesejahteraan rakyat terlihat pada prioritas masyarakat miskin dimana prioritas penggunaan uang BLT paling utama adalah sembako. Hal ini menunjukan bahwa BLT belum efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin karena prioritas utama dari BLT tersebut masih untuk kebutuhan dasar. Namun BLT tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhan.Selain itu BLT tidak

terpengaruh terhadap kinerja masyarakat miskin karena masyarakat miskin tidak bisa hidup jika hanya menggantungkan penerimaannya pada BLT.



Untuk mengetahui respon masyarkat terhadap BLT yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi COVID-19, maka peneliti melakukan wawancara kepada masyarkat perwakilan dari beberapa kecamatan di Kota Bandung. Peneliti melakukan wawancara online kepada lima masyarkat sebagai informan dengan kriteria merupakan masyarakat miskin terdampak COVID-19, tidak memiliki penghasilan sama sekali semenjak adanya pandemi COVID-19 dan memiliki tanggungan seperti anak yang masih balita atau anak yang masih bersekolah. Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Kota Bandung dengan memilih beberapa kecamatan. Teknik pemilihan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih informan. Dengan kriteria inklusi yaitu kriteria informan yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian.

Dari wawancara online yang dilakukan peneliti, maka peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut :

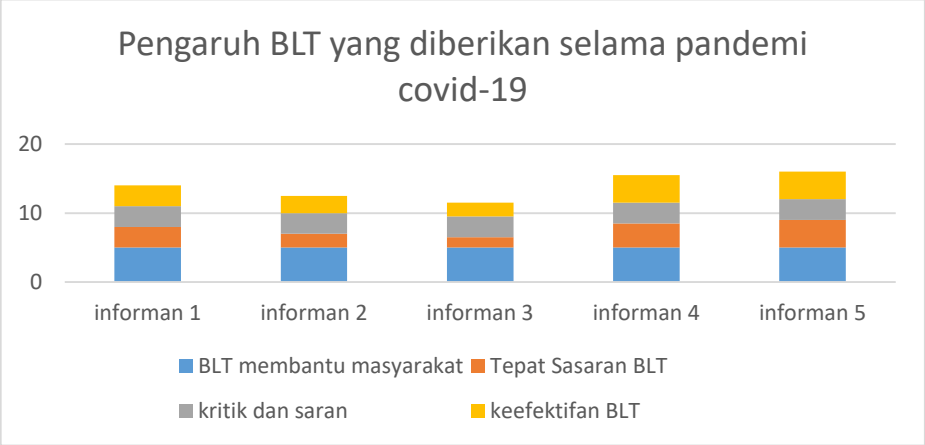
1. Informan 1 bernama Agus usia 35 tahun. Bekerja sebagai Sales motoris frisian flag yang saat ini sedang dirumahkan akibat adanya pandemi COVID-19, merupakan kepala rumah tangga dengan 5 orang tanggungan. Berasal dari kecamatan Arcamanik Bandung. Menurutnya BLT yang dikeluarkan pemerintah cukup membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah saat masa pandemi ini. Namun BLT yang disalurkan dirasa belum tepat sasaran, karena masih banyak masyarakat yang tidak mendapat bantuan padahal mereka sangat membutuhkannya. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah tidak mengandalkan RT/RW setempat untuk mendapatkan data namun diharapkan petugas dari kecamatan langsung yang melihat kondisi masyarakat dilapangan.
2. Informan 2 bernama Sandi usia 27 tahun. Saat ini tidak bekerja karena telah di berhentikan dari perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya akibat dari pandemi COVID-19, merupakan kepala rumah tangga dengan 2 orang tanggungan. Berasal dari kecamatan Buah Batu Bandung. Menurutnya BLT yang diberikan ini cukup membantu masyarakat tertentu, namun kebanyakan bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran contohnya informan yang sama sekali tidak mendapat bantuan apapun padahal informan juga merasakan dampaknya. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah dapat mendata dengan lebih akurat karena masih banyak orang-orang kalangan atas yang justru mendapatkan bantuan tersebut.
3. Informan 3 bernama Rohendi usia 57 tahun. Saat ini sama sekali tidak memiliki penghasilan karena pekerjaan sebelumnya hanya serabutan, dan semenjak adanya pandemi penghasilannya benar-benar tidak ada, merupakan kepala rumah tangga dengan 1 orang tanggungan. Berasal dari kecamatan Cilengkrang Bandung. Menurutnya BLT memang membantu namun sama sekali tidak tepat sasaran. Dari awal dikeluarkannya bantuan, imforman sangat berharap mendapatkan bantuan tersebut. Namun pada kenyataannya sampai saat ini belum ada satu bantuan pun yang informan dapatkan. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
4. Informan 4 bernama Anwar usia 40 tahun. Seorang penjahit yang saat ini penghasilannya berkurang selama adanya pandemi COVID-19, merupakan kepala keluarga dengan 2 orang tanggungan. Berasal dari kecamatan Arcamanik Bandung. Menurutnya BLT sudah tepat

 E-ISSN : 2686-178X

sasaran, dan informan merupakan salah satu yang merasakan manfaat dari BLT yang diberikan pemerintah. Informan mendapatkan BLT selama 3 bulan berturut-turut dan bantuan tersebut cukup membantu perekonomian keluarganya. Saran yang diberikan agar pemerintah dapat lebih fokus pada masyarakat menengah kebawah dan menambah bantuan lebih banyak lagi pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

5. Informan 5 bernama Eni usia 23 tahun. Seorang anak rantau yang saat ini sedang dirumahkan dari tempatnya bekerja. Merupakan anak kost yang merantau ke Bandung tinggal di kecamatan Kiaracondong Bandung. Menurutnya BLT yang diberikan sangat membantu, karena informan merupakan salah satu yang mendapatkan bantuan. BLT yang diberikan sudah tepat sasaran sesuai program pemerintah yang mengatakan bahwa anak rantau juga akan mendapatkan bantuan, hal itu dirasakan informan. Saran yang diberikan diharapkan bantuan dapat disalurkan lebih merata dan tepat sasaran dan tidak bergantung pada petugas setempat seperti RT RW di masing-masing wilayah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti dapat memberikan tanggapan dengan bagan sebagai berikut :



Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa informan lebih banyak memberikan respon yang kurang baik terutama karena tidak tepat sasarannya BLT yang diberikan pemerintah. Bantuan ini memang membantu perekonomian masyarakat terutama yang terdampak pandemi COVID-19 namun hanya sebagian masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari bantuan ini.

Banyaknya kritik dan saran yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat dijadikan acuan pemerintah untuk semakin meningkatkan bantuan yang disalurkan terutama bagi masyarakat miskin yang terdampak dan masyarakat yang benar-benar kehilangan penghasilan semenjak adanya pandemi COVID-19. Dari beberapa perwakilan informan dapat diketahui bahwa di sebagian daerah, pembagian BLT yang dilakukan oleh petugas setempat (RT/RW) kebanyakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran, justru banyak keluarga yang tergolong keluarga mampu yang mendapat bantuan sementara keluarga miskin terdampak tidak mendapatkan bantuan. Dari beberapa informasi yang di dapatkan seperti berita di media sosial, banyak data masyarakat yang menyimpang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahkan dari satu KK ada yang mendapatkan lebih dari dua bantuan. Sementara yang kita ketahui bahwa gubernur Jawa Barat dari satu KK hanya berhak mendapatkan satu bantuan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dengan dikeluarkannya BLT oleh pemerintah selama pandemi menimbulkan banyak respon dari masyarakat khususnya yang terdampak covid-19. Dari beberapa narasumber yang dilakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa sebagian besar merasa BLT ini tidak tersalurkan secara efektif dan tidak tepat sasaran hal ini disebabkan karena adanya kegagalan informasi, sosialisasi, dan distribusi BLT. Saran yang dapat diberikan untuk pemerintah adalah agar lebih selektif dalam menyalurkan BLT kepada masyarakat dengan memperbaiki kembali data-data yang tidak akurat dan ikut serta ke lapangan untuk memastikan kebenaran data dan kriteria yang pantas mendapatkan BLT, selain itu pemerintah juga perlu membangun jaringan komunikasi lebih efektif, mulai dari pusat wilayah, daerah, RT sehingga distribusi BLT dapat tersalur dan terpantau dengan baik. Semenjak adanya pandemi ini semakin banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan inilah yang harus menjadi perhatian utama oleh pemerintah.

Pemerintah harus lebih selektif dalam mendata dan memilah masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Respon berupa kritik dan saran harus menjadi acuan pemerintah untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemerintah yang dirasa belum efektif.

REFERENSI

Akib, I., & Risfaisal. (2016). *Bantuan Langsung Tunai*. *III*(2), 126–135.

Desvanda Arya Putra, Reyndi Rusmanjaya, M. Hifdzi Rusydany, S. W. (2020). *EVALUASI PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI DAN PEJUANG MUDA MENUJU SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI KOTA SURABAYA*. *1*(3), 7–13.

Dr. H. Rahyunir Rauf, M. S. (2017). *DARI PERANGKAT DAERAH MENJADI PERANGKAT KECAMATAN Oleh : Dr . H . Rahyunir Rauf , M . Si Dosen Ilmu Pemerintahan FISIPOL – UIR Abstrak WEDANA Jurnal Pemerintahan , Politik dan Birokrasi Jurnal Pemerintahan , Politik dan Birokrasi*. *III*(April), 221–232.

Parwanto, E. (2020). *Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19*. *3*(1), 707–708. https://doi.org/10.1038/nsmb1123

Salam, W. R. (2020). *INFLASI DITENGAH PANDEMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. (1), 187–192.

Samud. (2018). *Peranan Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam*. *10*(2), 215–228. https://doi.org/10.24235/amwal.v

Setiawan, I. B. (2017). *RESPON MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN KERETA API DI DESA BAGAN SINEMBAH KOTA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILR Oleh*. *4*(2).

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., … Cipto, R. (2020). *Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures*. *7*(1), 45–67.

Telaumbanua, D. (2020). *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*. *12*(1), 59–70.

Yunus, N. R., Rezki, A., Nabi, K., Saw, M., Wabah, M., & Menular, P. (2020). *Sosial dan Budaya Syar'i*.

Rustan, Ahmad Sultra, dan Nurhakki Hakki. 2017. Pengantar Ilmu Komunikasi. Yogyakarta: Deepublish.

Eriyanto. 2011. Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan ilmu-ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Prenadamedia Group.

Wiryanto. Pengantar Ilmu Komunikasi. Kriyantono Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi. 2014. Jakarta: Kencana.

Wardhono Agus, Yuyun Istiana. 2018. Prosiding Seminar Nasional 2018 Jilid 3: Memaksimalkan peran pendidik dalam membangun karakter anak usia dini sebagai wujud investasi bangsa. Tuban: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Roggolawe Tuban.